

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan II Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 17 Juli 2023

**Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok**



Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB 1. PENDAHULUAN...	12
1.1.LATAR BELAKANG	12
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.3.TUGAS DAN FUNGSI.....	12
1.4.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	15
1.5.SISTEMATIKA LKJ.....	16
BAB 2.PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1.RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020-2024	18
2.1.1.VISI.....	8
2.1.2.MISI.....	18
2.1.3.TUJUAN.....	18
2.1.4.SASARAN KEGIATAN	19
2.1.5.STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	20
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN.....	22
2.3.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	23
2.4.PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023	24
BAB 3.AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
3.2.ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	32
3.3.CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	88
3.4.EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	88
BAB 4.PENUTUP.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023	26
Tabel 2. Nilai PNPB BPBL Lombok	33
Tabel 3. Penyaluran bantuan KBRL Triwulan II Tahun 2023	35
Tabel 4. Capaian bantuan sarana KBRL	36
Tabel 5. perbandingan prosentase capaian bantuan sarana KBRL	36
Tabel 6. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat	38
Tabel 7. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	42
Tabel 8. perbandingan prosentase capaian bantuan benih	42
Tabel 9. Bantuan calon induk yang didistribusikan ke masyarakat	44
Tabel 10. Persentase Bantuan calon induk yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	46
Tabel 11. perbandingan prosentase capaian bantuan calon induk	46
Tabel 12. Capaian Produksi Calon Induk Unggul	47
Tabel 13. calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	48
Tabel 14. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi	49
Tabel 15. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok	50
Tabel 16. Capaian produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombok	52
Tabel 17. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombok	52
Tabel 18. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate	53
Tabel 19. Presentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat	55
Tabel 20. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat	56
Tabel 21. perbandingan prosentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat	56
Tabel 22. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok	58
Tabel 23. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat	60
Tabel 24. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	61
Tabel 25. Presentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium	62
Tabel 26. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel lab kesling UPT Laut	62
Tabel 27. Realisasi Jumlah sampel AMR	64
Tabel 28. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	65
Tabel 29. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut	65
Tabel 30. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok	68
Tabel 31. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker BPBL Lombok	69
Tabel 32. Presentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok	71
Tabel 33. Nilai Rekon SAKIP lingkup Satker BPBL Lombok	73

Tabel 34. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan	74
Tabel 35. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker BPBL Lombok.....	74
Tabel 36. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	76
Tabel 37. Capaian Manajemen Pengetahuan ;ingkup UPT DJPB.....	76
Tabel 38. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok	77
Tabel 39. perbandingan prosentase capaian nilai IKPA	78
Tabel 40. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok	79
Tabel 41. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	81
Tabel 42. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok.....	83
Tabel 43. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi.....	84
Tabel 44. Indeks Pengelolaan Kepegawaian	86
Tabel 45. Nilai Pengawassan Kearsipan	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023	14
Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Juni 2023	14
Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Juni 2023	15
Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Juni 2023	15
Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2023.....	24
Gambar 6. Screenshot aplikasi Kinerjaku.....	25
Gambar 7. Realisasi PNBP Tahun 2023	33
Gambar 8. Dokumentasi Penyerahan bantuan sarana KBRL ke masyarakat	35
Gambar 9. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat.....	42
Gambar 10. Dokumentasi penyerahan bantuan calon induk Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat ..	46
Gambar 11 Dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul.....	48
Gambar 12. Pemeliharaan mikropropagul menjadi thalus muda	52
Gambar 13. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi bioflok	54
Gambar 14. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana ikan hias.....	60
Gambar 15. Kegiatan pengambilan sampel Lab kesling.....	62
Gambar 16. Kegiatan pengambilan sampel AMR.....	64
Gambar 17. Kegiatan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar	67
Gambar 18. Kegiatan rapat internal dalam rangka pengumpulan dokumen per semester I Tahun 2023	69
Gambar 19. Screenshot LKE Kinerja BPBL Lombok	72
Gambar 20. Laporan Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA.....	79
Gambar 21. Alat rusak berat yang dipindahkan dari gerupuk ke Sekotong	82
Gambar 22. Pengisian data pada aplikasi KUSUKA	84
Gambar 23. Kegiatan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar	87
Gambar 24. Screenshot aplikasi OMSPAN	88
Gambar 25. Hasil efisiensi berdasarkan aplikasi SMART DJA.....	88

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat pada Wilayah kerja BPBL Lombok ” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Nilai PNBK Satuan Kerja BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : “Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan” didukung oleh 11 (sebelas) IKU, yaitu : (i) Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (ii) Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (iii) Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (iv) Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (v) Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (vi) Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (vii) Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (viii) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (ix) Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (x) Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan” didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu: (i)

Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok; (ii) Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 13 (tiga belas) IKU yaitu (i) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok; (ii) Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok; (iii) prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok; (iv) Nilai rekon kinerja BPBL lombok; (v) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas; (vi) prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar; (vii) nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok; (viii) NKA lingkup satker BPBL lombok, (ix) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok, (x) Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok, (xi) Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, (xii) Indeks Pengelolaan kepegawaian, (xiii) Nilai Pengawasan Kearsipan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 26 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 11 (Sebelas) Indikator kinerja yang mencapai target yang telah ditentukan pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu :

1. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 33,33% dari target 30%;
2. Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 62,93% dari target 50%;
3. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 71,73% dari target 50%;
4. Produksi Calon Induk Unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebanyak 671 ekor dari target 450 ekor;
5. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebanyak 1.320 planlet dari target 1.200 planlet;
6. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 89,29% dari target 50%;

7. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 58,82% dari target 50%;
8. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok sebanyak 76,45 dari target 73;
9. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 93,33% dari target 75%;
10. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 92%.
11. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok sebesar 89,83 dari target 82;

Sementara terdapat 14 (Empat belas) indikator yang belum bisa dihitung pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu :

1. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
2. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat;
3. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat;
4. Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
5. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat;
6. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
7. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok;
8. Nilai rekon kinerja BPBL lombok;
9. NKA lingkup satker BPBL lombok;
10. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL Lombok;
11. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
12. Persentase Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
13. Indeks Pengelolaan kepegawaian;
14. Nilai Pengawasan Kearsipan.

Sedangkan 1 (Satu) indikator yang tidak tercapai pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu :

1. Nilai PNBP BPBL Lombok sebesar Rp.290.057.804 dari target Rp 350.000.000 ;

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2023, dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai pada Triwulan II Tahun 2023, yaitu Nilai PNBK BPBL Lombok yang disebabkan oleh penurunan penjualan akibat menurunnya permintaan benih dari buyer, khususnya untuk ekspor.

Beberapa langkah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah :

1. Menginstruksikan para Ketua POKJA - produksi benih komoditas laut, untuk mencoba memasarkan hasil produksi benih kepada para stakeholder yang berpotensi menyerap benih hasil produksi
2. Menginstruksikan kepada para ketua POKJA pembesaran ikan, lobster dan kekerangan untuk secara konsisten dapat memaksimalkan produksi untuk mencapai target PNBK thn 2023

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dan kemudian dituangkan dalam LKj Triwulan II Tahun 2023. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Triwulan II Tahun 2023 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok Triwulan II Tahun 2023; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

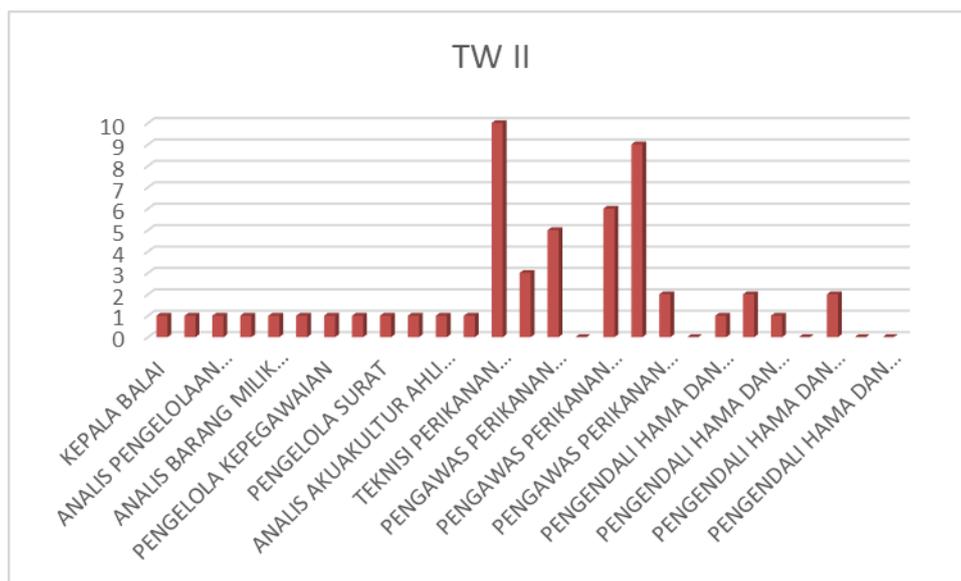
1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

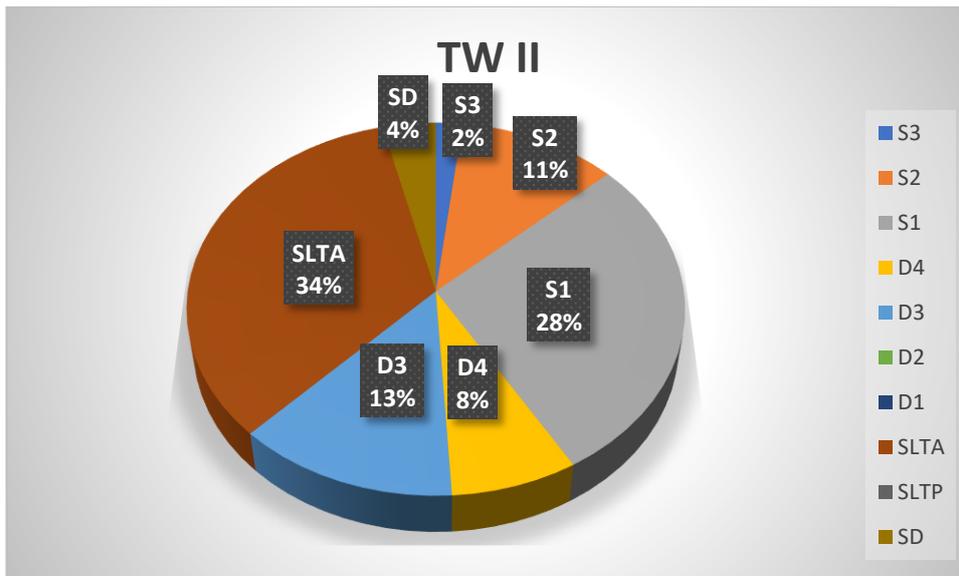


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Tahun 2023

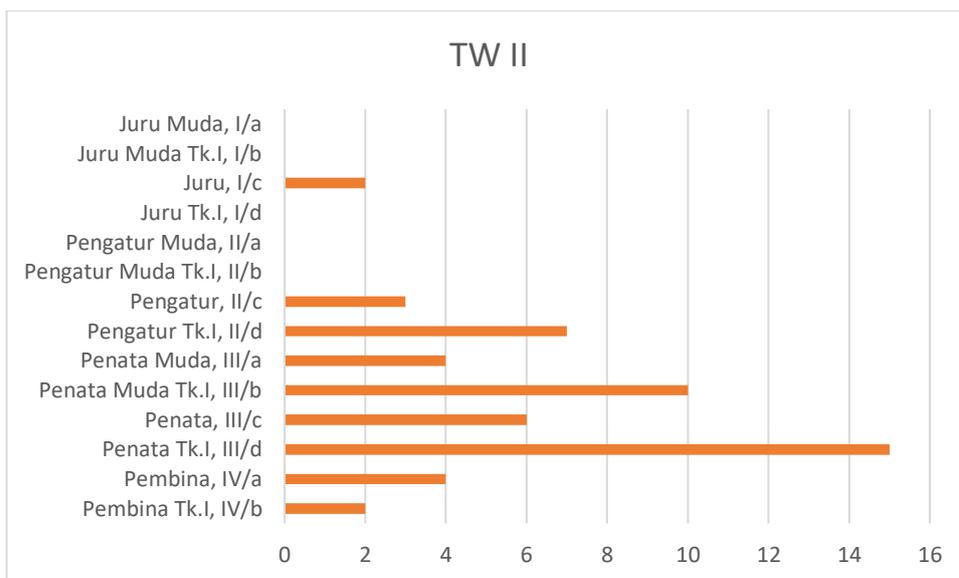
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 78 orang dengan rincian sejumlah 53 orang ASN dan sejumlah 24 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan jabatan per Juni 2023



Gambar 3. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Juni 2023



Gambar 4. Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Juni 2023

1.4. Isu Strategis (*Strategic Issued*) dan Permasalahan Utama

1.4.1. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (*Marine Culture*) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang

(Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2. Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di BPBL Lombok

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian semua program prioritas pada Triwulan II Tahun 2023 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Komoditas Finfish yang saat ini ukuran ikannya belum mencapai ukuran pasar dimana diperkirakan pada bulan September baru akan dilakukan penjualan saat ikan mencapai ukuran >250-300 gr.
2. Tingginya permintaan bantuan benih air laut komoditas kakap putih.
3. Perubahan Juknis bantuan bioflok yang baru keluar pada bulan Mei 2023.

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Triwulan II Tahun 2023 . LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Triwulan II Tahun 2023 dengan target dan kinerja pada tahun

sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Triwulan II Tahun 2023 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Triwulan II Tahun 2023 .
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2020 – 2024

2.1.1. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2.1.2. Misi

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan;dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Ekonomi sektor budidaya meningkat pada Wilayah Kerja BPBL Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBP Satuan Kerja BPBL Lombok
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - b. Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
 - c. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - d. Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - e. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - f. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
 - g. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat;
 - h. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat;
 - i. Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;
 - j. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang Kawasan dan Kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :

- a. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
 - b. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
- a. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok
 - b. Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK di satker BPBL Lombok;
 - c. prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok
 - d. Nilai rekon kinerja BPBL lombok
 - e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas
 - f. prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar;
 - g. nilai IKPA lingkup satker BPBL Lombok;
 - h. NKA lingkup satker BPBL lombok,
 - i. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa lingkup satker BPBL lombok;
 - j. Tingkat kepatuhan Pengelolaan barang milik negara lingkup satker BPBL Lombok;
 - k. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
 - l. Indeks pengelolaan kepegawaian;
 - m. Nilai Pengawasan Kearsipan;

2.1.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi BPBL Lombok untuk berkontribusi langsung mengambil bagian untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya Tahun 2020-2024 adalah dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas DJPB sebagai berikut :

- a. Aspek sosial ekonomi:

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penyaluran bantuan induk unggul dan benih bermutu kepada kelompok pembudidaya untuk menghidupkan

- kembali usaha budidaya skala kecil, serta mengoptimalkan fungsi UPT dan UPTD serta unit pembenihan masyarakat untuk membantu kontinuitas usaha kelompok penerima bantuan tersebut;
- Penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok pembudidaya, antara lain bibit/benih, pakan, obat ikan dan vitamin, pupuk serta peralatan, sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
 - Pengembangan kebun bibit rumput laut melalui pemberian bantuan bibit bermutu di kawasan sentra kebun bibit rumput laut.
- b. Aspek teknologi produksi:

Meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi serta pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi;
- Peningkatan kualitas induk dan benih melalui sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk menghasilkan unit pembenihan bersertifikat;
- Pelaksanaan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk menghasilkan pembudidaya (pembesaran ikan) bersertifikat;
- Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut dengan sistem Kultur Jaringan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas ikan non konsumsi (ikan hias, karang buatan, tanaman hias dll);
- Pengembangan sentra budidaya baru berbasis kawasan/klaster, dimana salah satu gebrakan KKP adalah pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya ditugaskan untuk mengawal 3 kawasan SKPT, yaitu Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
- Pelaksanaan budidaya lele sistem bioflok, yaitu teknologi budidaya lele intensif dengan mengandalkan suplai oksigen dan gumpalan (flok) mikroorganisme tertentu. Untuk tahap awal, fokus kegiatan bioflok dilakukan di pesantren, untuk kemudian diperluas ke wilayah lain. Tujuan bioflok adalah meningkatkan ketahanan pangan, memenuhi gizi protein santri, meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta perekonomian pesantren dan masyarakat
- Pengembangan sarana input produksi inovatif di UPT Pusat, misalnya

protein rekombinan, vaksin, enzim, probiotik, immunostimulan, rekayasa genetik, automatic feeder, karamba bulat, dll.

c. Aspek sumber daya alam dan lingkungan:

Mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, dilaksanakan dengan komponen kegiatan prioritas sebagai berikut:

- Penerapan perekayasa teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan dan sesuai dengan daya dukung;
- Pengembangan Culture Based Fisheries (CBF) dengan pendekatan komoditas multitrophic level.
- Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal unggulan dan species ikan tahan perubahan lingkungan;
- Pengendalian plasma nutfah induk dan benih;

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan II Tahun 2023 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan perbenihan ikan
2. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan ; (v) Penyidikan dan Pengujian Penyakit; (vi) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (vii) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (viii) Layanan dukungan manajemen internal; (ix) layanan manajemen SDM internal; (x) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 sebesar **Rp. 25.088.141.000- (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

- a. Pengelolaan perbenihan ikan sebesar Rp. 5.910.866.000
- b. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan sebesar Rp. 622.718.000

- c. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp. 7.315.000.000
- d. Dukungan manajemen internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 11.239.557.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen anatara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2023. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2023 .



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayan Sofyan
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Yayan Sofyan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1 Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	1 Nilai PNPB Sabuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762 305 000
SK 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2 Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumpul Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75
	3 Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	4 Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	5 Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (ekor)	1.400
	6 Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	7 Produksi bibit rumpul laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (plantlet)	3.000
	8 Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100
	9 Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100
	10 Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	11 Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 3 Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan	12 Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	13 Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
SK 4 Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	14 Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	81
	15 Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	76
	16 Prosentase penyelesaian LHP BPK alias Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100
	17 Nilai REKON SAKIP Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	93
	18 Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75
	19 Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	92
	20 Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	89
	21 NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	82
	22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77,5
	23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77,5
	24 Prosentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)	80
	25 Indeks pengelolaan kepegawaian	3
	26 Nilai Pengawasan kearsipan	75

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Perbenihan Ikan	5.910.866.000
2	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	622.718.000
3	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7.315.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.239.557.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2023		25.088.141.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

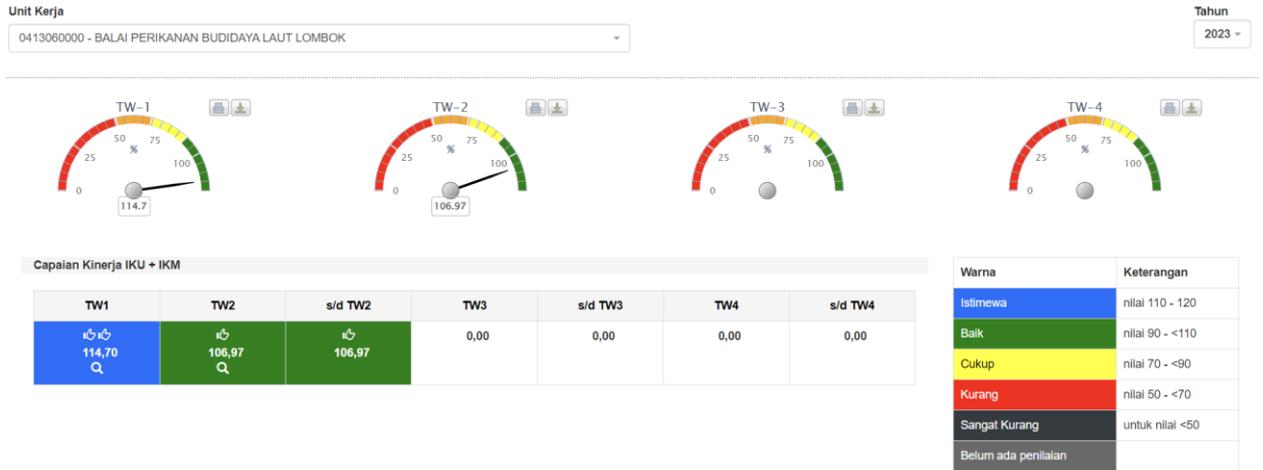
Yayan Sofyan

Gambar 5. Perjanjian kinerja Tahun 2023

2.4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian nilai kinerja Pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah sebesar 106,97 % atau masuk dalam kategori BAIK (Hijau). Berikut adalah hasil hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



Gambar 6. Screenshot aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 106,97 %. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)	Target TW II	Realisasi s/d TW II	Realisasi Terhadap Target TW II (%)	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
Ekonomi Sektor perikanan budidaya meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok	1	Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Rp)	762,305,000	350,000,000	290,057,804	82.87	38.05
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	2	Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	30	33.33	111.10	44.44
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	3	Persentase bantuan benih yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	50	62.93	125.86	62.93

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	4	Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	50	71.73	143.46	71.73
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	5	Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(ekor)	1,400	450	671	149.11	47.93
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	6	Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	7	Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (planlet)	3,000	1200	1,320	110.00	44.00
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	8	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	-	0	0.00	0

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	9	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100	-	0	#DIV/0!	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	10	Prosentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	11	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat (%)	100	-	0	0.00	0
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	12	Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	100	50	89.29	178.58	89.29

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan Dan Kesehatan Ikan	13	Persentase sampel antimikrobia resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok(%)	100	50	58.82	117.64	58.82
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	14	Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	81	73	76	104.73	94.38
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	15	Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	76	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	16	Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker BPBL Lombok (%)	100	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	17	Nilai REKON SAKIP Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	93	-	0	0.00	0

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	18	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	75	75	93.33	124.44	124.44
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	19	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)	92	92	100	108.70	109
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	20	Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	89	82	90	109.55	101
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	21	NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	82	-	0	0.00	0

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	77.5	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	24	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)	80	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	25	Indeks pengelolaan kepegawaian	3	-	0	0.00	0
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	26	Nilai Pengawasan kearsipan	75	-	0	0.00	0

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 :

Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBL Lombok

1. Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP BPBL Lombok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat kendala yaitu adanya serangan penyakit ikan yang menyebabkan penjualan ikan konsumsi tidak terlalu banyak dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan pokja Lab kesling untuk menangani serangan penyakit ikan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah berkoordinasi dengan pokja lab kesling untuk menekan serangan penyakit ikan dengan memberi imunostimulan dan vitamin c melalui pakan (oral) untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga mengurangi kematian serta dengan melakukan perendaman air tawar secara rutin untuk menghilangkan parasit pada ikan sehingga mengurangi patogen sekunder dari ikan. namun demikian, meski sudah dilakukan koordinasi dengan pokja Lab kesling, berdasarkan Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tanggal 10 Juli 2023 Nomor B.4931/DJPB.1/KU.340/VII/2023 perihal capaian realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan II Tahun 2023, realisasi PNBP BPBL Lombok hanya tercapai sebesar Rp 290.057.804 atau 82.87% dari target TW II yaitu Rp 350.000.000. Berikut adalah gambar realisasi PNBP BPBL Lombok yang dapat dibandingkan dengan Unit pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D Juni 2023	% SESUAI PK	S / D BULAN
REALISASI PENDAPATAN PNBP						
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Pusat)	Rp	Rp 4.011.787.864		Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 45.784.460		CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 3.966.001.404		
			Rp	Rp 1.124.725.000	218,31	Juni 2023
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (Karawang)	Rp	Rp 1.124.725.000	248,925.165	217,74
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	6.509.352	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 4.240.598.000	789.221.531	18,61
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp	Rp 4.240.598.000	703.373.424	16,59
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	85.848.107	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 1.266.132.000	686.043.639	54,18
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp	Rp 1.266.132.000	682.479.191	53,90
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	3.564.448	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 1.325.270.000	679.147.426	51,25
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp	Rp 1.325.270.000	676.210.538	51,02
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	2.936.888	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 3.375.974.000	1.626.127.078	48,17
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Simabondolo	Rp	Rp 3.375.974.000	1.619.171.570	47,96
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	6.955.408	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 1.534.500.000	869.329.144	56,65
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp	Rp 1.534.500.000	866.071.998	56,44
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	3.257.146	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp 1.616.512.000	1.178.755.379	72,92
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp	Rp 1.616.512.000	959.409.988	59,35
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp -	219.345.391	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN. BSSN

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp	Rp 1.632.830.000	Rp 568.035.502	34,79	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 1.632.830.000	Rp 565.894.382	34,66	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 2.141.120		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp	Rp 1.220.210.000	Rp 488.832.775	40,06	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 1.220.210.000	Rp 484.750.800	39,73	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 4.081.975		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp	Rp 1.150.000.000	Rp 508.643.600	44,23	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 1.150.000.000	Rp 498.806.300	43,37	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 9.837.300		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Taten	Rp	Rp 1.143.800.000	Rp 466.811.978	40,81	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 1.143.800.000	Rp 419.030.589	36,63	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 47.781.389		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambau	Rp	Rp 940.200.000	Rp 529.084.041	56,27	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 940.200.000	Rp 513.290.841	54,59	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 16.793.200		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp	Rp 762.305.000	Rp 301.272.273	39,52	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 762.305.000	Rp 290.057.804	38,05	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 11.214.469		
			Rp	Rp 550.000.000	Rp 679.753.379	123,59	
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 550.000.000	Rp 678.768.499	123,41	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 984.830		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeragaman Karangsem	Rp	Rp 706.750.000	Rp 398.676.241	56,41	Juni 2023
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	Rp 706.750.000	Rp 380.091.000	53,78	CAPAIAN IKU
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	Rp -	Rp 18.585.241		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp	22.589.806.000	Rp 13.451.288.119	59,55	CAPAIAN IKU
		JUMLAH NON ANGGARAN (II)	Rp	-	Rp 4.404.839.768		
		JUMLAH PENDAPATAN I + II	Rp	22.589.806.000	Rp 16.236.956.317	71,88	

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN. BSSN

Gambar 7. Realisasi PNBP Tahun 2023

Capaian PNBP BPBL Lombok pada Tahun 2023 ini turun sebesar 27,37% dari capaian PNBP Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai PNBP BPBL Lombok

Nama SK :Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok meningkat di wilayah kerja BPBL Lombok								
Nama Indikator : Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi		Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Triwulan II Tahun 2023 thd Triwulan II Tahun 2022 (%)			Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
350,000,000	290,057,804	82.87%	399,346,419	-27.37	762,305,000	830,000,000	34.95	

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat kendala yaitu meskipun produksi BPBL Lombok tidak memiliki kendala akan tetapi untuk penjualan mengalami penurunan yang secara umum disebabkan karna menurunnya permintaan benih dari buyer, khususnya untuk ekspor sehingga tindak lanjut ke depannya adalah Menginstruksikan para Ketua POKJA - produksi benih komoditas laut, untuk mencoba memasarkan hasil produksi benih kepada para stakeholder yang berpotensi menyerap benih hasil produksi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

2. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Kebun Bibit Rumput Laut yang terdistribusikan ke masyarakat berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 295 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya TA 2023 merupakan bantuan pemerintah berupa barang yaitu sarana dan prasarana KBRL dengan metode :

- 1) Longline;
- 2) Rakit apung; dan
- 3) Lepas dasar.

3. Rincian Sarana Bantuan

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan informasi terkait penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terutama untuk kelompok aspirasi, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah berkoordinasi secara intensif dengan Tenaga Ahli untuk mempercepat penentuan kelompok.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah ditentukannya calon penerima dan calon lokasi pada bantuan sarana KBRL sehingga pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah disalurkan sebanyak 5 unit bantuan sarana KBRL ke wilayah NTB atau sekitar 33,33% dari target bantuan sarana kebun bibit rumput laut yang semula targetnya berjumlah 20 unit namun berubah menjadi 15 unit karena adanya

rencana *Automatic Adjustment*. Berikut adalah tabel penyaluran bantuan sarana KBRL dan dokumentasi penyerahan bantuan KBRL:

Tabel 3. Penyaluran bantuan KBRL Triwulan II Tahun 2023

NO	LOKASI PENERIMA			KOMODITAS	METODE BUDIDAYA	VOL	SATUAN VOL	ERIMA BANTU NAMA KELOMPOK	SK PENETAPAN PENERIMA (NOMOR DAN TANGGAL)	NOMOR BAST	TANGGAL BAST
	PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN/ DESA								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(14)	(16)	(17)
1	NUSA TENGGARA BARAT	KAB.BIMA	Langgudu / Waworada	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	Berkah laut	B.744/BPBL-L/PB.150-KBRL/III/2023 tanggal 13 Maret 2023	B.1532/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
2	NUSA TENGGARA BARAT	KAB.BIMA	Langgudu / Rupe	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	So Soro		B.1533/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
3	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	Tarano / Labuan Aji	Sakul	Sistem Longline	1	Paket	Sumber Laut		B.1535/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
4	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	Tarano / Labuan Bontong	Cottonii coklat lokal	Sistem Longline	1	Paket	Pasir Putih		B.1534/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023
5	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	Mangelewa / Kwangko	Cottonii Coklat Lokal	Sistem Longline	1	Paket	Bajo Pesisir		B.1531/BPBL-L/PB.150/KBRL/VI/2023	26 Juni 2023



Gambar 8. Dokumentasi Penyerahan bantuan sarana KBRL ke masyarakat

Capaian bantuan sarana KBRL pada Triwulan II Tahun 2023 turun sebesar 33.34% dibandingkan capaian bantuan sarana KBRL Triwulan II Tahun 2022 dan tidak dapat dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 karena satuan pengukurannya berbeda. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan sarana KBRL Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian bantuan sarana KBRL

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan									
Nama Indikator : Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 thd Triwulan II Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
30	33.33	111.10%	50	-33.34	75	44.44%	24	0.00	

Bantuan sarana KBRL BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BPBL Batam namun lebih tinggi dari BPBL Ambon, sedangkan belum bisa dibandingkan dengan BBPBL Lampung karena belum ada capaiannya. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 5. perbandingan prosentase capaian bantuan sarana KBRL

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	75 %	33.33 %	44.44
BPBL Ambon	75 %	13.04 %	17.39
BPBL Batam	75 %	50 %	66.67
BBPBL Lampung	75 %	0 %	0.00

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 292.709.950 atau 32,52% dari pagu untuk kegiatan survey dan identifikasi di wilayah Bali,NTB, dan NTT serta belanja bahan untuk ATK dan penyerahan bantuan sarana KBRL di wilayah NTB.

Pada Triwulan II Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi adalah proses pengadaan paket KBRL di prov NTT belum bisa dilaksanakan karena kegiatan Cek Penerima dan Cek Lokasi untuk 8 (delapan) kelompok di NTT tersebut baru dilaksanakan pada akhir mei, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menginstruksikan tim penyaluran bantuan KBRL dan tim Pengadaan Barang dan jasa untuk mempercepat pembuatan RAB dan memproses pengadaan KBRL supaya dapat terealisasi pada Triwulan III Tahun 2023.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Di Wilayah Kerja BPBL Lombok

3. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan benih bawal bintang, kakap putih, abalone, ikan hias laut, tiram Mutiara, nila, lele kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm
- f. Nila ukuran minimal 4 cm
- g. Lele ukuran minimal 4 cm

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang dihadapi adalah proses distribusi bantuan benih air tawar yang masih terkendala pada revisi anggaran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan revisi RKAKL untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya revisi anggaran sehingga dapat dilakukan distribusi bantuan benih air tawar dan juga bantuan benih air laut ke beberapa wilayah di NTB dan NTT.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Bantuan benih yang terdistribusi ke masyarakat telah terealisasi sebanyak 542.212 ekor atau 62,93% dari target bantuan benih yang terdiri dari bantuan benih air tawar dan juga bantuan benih air laut. Bantuan benih air laut yang telah didistribusikan ke masyarakat sebanyak 319.000 ekor yang terdiri dari ikan bawal bintang dan kakap putih yang telah disalurkan ke beberapa wilayah di NTB yaitu Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Bantuan benih air tawar yang telah didistribusikan ke masyarakat sebanyak 222.712 ekor yang terdiri dari ikan lele dan nila yang telah disalurkan ke beberapa wilayah di NTT yaitu TTU,

TTS, Malaka dan Kupang. Berikut adalah tabel capaian realisasi benih dan dokumentasi bantuan benih :

Tabel 6. Bantuan benih yang didistribusikan ke masyarakat

No	Jenis Bantuan	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)
Jumlah Total					542,212
REALISASI BANTUAN BENIH BPBL LOMBOK TAHUN 2023					
Per bulan Januari - 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	26 Januari 2023	Bawal Bintang	22,000
Per bulan Februari- 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	8 Februari 2023	Kakap Putih	20,000
2	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	9 Februari 2023	Kakap Putih	20,000
3	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	25,000
4	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	16 Februari 2023	Kakap Putih	7,500
Per bulan Maret - 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000
2	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	16 Maret 2023	Bawal Bintang	15,000
3	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	27 Maret 2023	Bawal Bintang	30,000
Per bulan April - 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	12 April 2023	Kakap Putih	30,000
2	Bantuan Benih Laut	Lombok Tengah	13 April 2023	Kakap Putih	20,000
Per bulan Mei - 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	2 Mei 2023	Kakap Putih	30,000
2	Bantuan Benih Laut	Lombok Barat	3 Mei 2023	Kakap Putih	25,000
3	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	19 Mei 2023	Bawal Bintang	15,000
4	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	19 Mei 2023	Bawal Bintang	15,000

5	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	500
6	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	500
7	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	5,250
8	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	Nila	4,375
9	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	500
10	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	500
11	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	840
12	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	2,625
13	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	1,470
14	Bantuan Benih Tawar	TTU	28 Mei 2023	lele	500
15	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	1,000
16	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	5,040
17	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	1,000
18	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	500
19	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	500
20	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	1,700
21	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	500
22	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	500
23	Bantuan Benih Tawar	TTU	27 Mei 2023	lele	500
24	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500
25	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500
26	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500
27	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500

28	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500
29	Bantuan Benih Tawar	TTU	26 Mei 2023	lele	500
30	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	3,150
31	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	2,030
32	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	10,000
33	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	5,250
34	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
35	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
36	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
37	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
38	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
39	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	5,880
40	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
41	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
42	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	1,000
43	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
44	Bantuan Benih Tawar	TTU	25 Mei 2023	lele	500
45	Bantuan Benih Tawar	Malaka	24 Mei 2023	Nila	1,652
Per bulan Juni - 2023					
1	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	5 Juni 2023	Bawal Bintang	15,000
2	Bantuan Benih Laut	Lombok Timur	5 Juni 2023	Bawal Bintang	15,000
3	Bantuan Benih Tawar	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	2,800
4	Bantuan Benih Tawar	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
5	Bantuan Benih Tawar	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000

6	Bantuan Benih Tawar	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
7	Bantuan Benih Tawar	TTS	Rabu 21 Juni 2023	lele	10,000
8	Bantuan Benih Tawar	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	3,000
9	Bantuan Benih Tawar	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	3,000
10	Bantuan Benih Tawar	TTS	Kamis, 22 Juni 2023	lele	15,000
11	Bantuan Benih Tawar	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,000
12	Bantuan Benih Tawar	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	6,200
13	Bantuan Benih Tawar	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,300
14	Bantuan Benih Tawar	TTS	Jum'at 23 Juni 2023	lele	1,500
15	Bantuan Benih Tawar	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	5,200
16	Bantuan Benih Tawar	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	2,000
17	Bantuan Benih Tawar	TTS	Sabtu, 24 Juni 2023	lele	5,000
18	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	700
19	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	2,500
20	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	7,000
21	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Rabu, 28 Juni 2023	lele	1,750
22	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	2,500
23	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	21,000
24	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	19,000
25	Bantuan Benih Tawar	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	16,000



Gambar 9. Dokumentasi penyerahan bantuan Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

Capaian bantuan benih pada Triwulan II Tahun 2023 naik sebesar 23,17 % dibandingkan capaian bantuan benih Triwulan II Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan benih adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Bantuan Benih yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Triwulan II Tahun 2022	Perbanding an Realisasi Triwulan II Tahun 2023 thd Triwulan II Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian				Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
50	62.93	125.86%	51.09	23.17	100	62.93%	100	62.93	

Bantuan benih BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan BPBL Lampung, BPBL Batam, dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 8. perbandingan prosentase capaian bantuan benih

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100 %	62.93 %	62.93
BPBL Ambon	100 %	53.92 %	53.92
BPBL Batam	100 %	54,17 %	54.17

BBPBL Lampung	100 %	42.19 %	42.19
---------------	-------	---------	-------

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.458.851.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 1.204.284.782 atau 48,98% dari pagu untuk belanja barang persediaan, kegiatan pemijahan, pendederan I, pendederan II, dan identifikasi, verifikasi serta distribusi bantuan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu indukan kakap putih yang secara jumlah dan kualitas mulai menurun, banyak berubah dari jantan ke betina sehingga tindak lanjut ke depannya adalah membeli indukan dari BPBL Ambon.

4. Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB pada Tahun 2023 ini bertanggung jawab mendistribusikan bantuan calon induk ikan bawal bintang, kakap putih, Nila, lele dan tiram mutiara kepada kelompok pembudidaya ikan.

IKU ini merupakan IKU baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan bantuan calon induk yang didistribusikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan calon induk kepada masyarakat.

Pada Triwulan sebelumnya Permasalahan yang terjadi adalah proses distribusi bantuan calon induk air tawar masih terkendala pada revisi anggaran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan revisi RKAKL untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya revisi anggaran sehingga dapat dilakukan distribusi bantuan calon induk air tawar ke wilayah di NTT.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Bantuan calon induk yang terdistribusi ke masyarakat telah terealisasi sebanyak 746 ekor atau 71.73 % dari target bantuan calon induk. Berikut adalah tabel capaian realisasi bantuan calon induk dan dokumentasi bantuan calon induk :

Tabel 9. Bantuan calon induk yang didistribusikan ke masyarakat

No	Nama Kelompok	Prov	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Calon induk (ekor)	Keterangan BAST	SK Penerima
Jumlah Total						746		
1	ADIKARA	NTT	TTS	Kamis, 24 Juni 2023	lele	6	Nomor B.1525/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023	B.1309/BPBL-L/PB.150/BC/VI/2023
2	sejahtera	NTT	KUPANG	27 Juni 2023	lele	14	Nomor B.1526/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023	
3	Sukamaju	NTT	KUPANG	27 Juni 2023	lele	4	Nomor B.1527/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023	
4	oe ingu	NTT	KUPANG	29 Juni 2023	lele	4	Nomor B.1536/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023	
5	Harapan	NTT	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	10	Nomor B.1532/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023	
6	Tunas Muda Buraen	NTT	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	10	Nomor B.1533/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023	
7	Oekase	NTT	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	5	Nomor B.1534/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023	

8	Kolam Betesda	NTT	KUPANG	Kamis, 29 Juni 2023	lele	4	Nomor B.1535/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023	
9	Jentel	NTT	KUPANG	30 Juni 2023	lele	4	Nomor B.1541/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023	
10	Ai Senap	NTB	Sumbawa	24 Juni 2023	Lele	65	Nomor B.1519.a/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023	B.1436/BPBL - L/PB.150/BC/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023
11	UPR Hidro Maxima Persada	NTB	Sumbawa	24 Juni 2023	Lele	65	Nomor B.1536a/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023	
12	Karamel Indah	NTB	Sumbawa	25 Juni 2023	Nila	265	Nomor B.1519.b/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 25 Juni 2023	
13	Tentung Jaya	NTB	Sumbawa	26 Juni 2023	Nila	290	Nomor B.1519.c/BPBL - L/PB.140/BC/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023	



Gambar 10. Dokumentasi penyerahan bantuan calon induk Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat

Capaian bantuan calon induk pada Triwulan II Tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan bantuan calon induk Triwulan II Tahun 2022 karena pada Tahun 2022 tidak ada IKU bantuan calon induk. Adapun tampilan secara singkat atas capaian bantuan calon induk adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Persentase Bantuan calon induk yang Terdistribusi berdasarkan Usulan Masyarakat Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase bantuan calon induk yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi Triwulan II Tahun 2022	Perbanding an Realisasi Triwulan II Tahun 2023 thd Triwulan II Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian				Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
50	71.73	143.46%	0	0	100	71.73%	100	71.73	

Bantuan calon induk BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BBPBL Lampung, BPBL Batam, dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 11. perbandingan prosentase capaian bantuan calon induk

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100	71.73	71.73
BPBL Ambon	100	150	150.00

BPBL Batam	100	100	100.00
BBPBL Lampung	100	278.69	278.69

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 48.503.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 32.132.300 atau 66,25% dari pagu untuk kegiatan belanja barang persediaan, identifikasi dan verifikasi serta distribusi bantuan.

Permasalahan yang terjadi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah belum dilakukannya identifikasi dan verifikasi untuk calon penerima bantuan calon induk air laut sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan identifikasi dan verifikasi bantuan calon induk air laut tersebut.

5. Produksi calon induk unggul di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Produksi calon induk unggul adalah kegiatan produksi calon induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

Pada triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu masa pemeliharaan dari benih menjadi induk untuk komoditas laut (finfish dan kekerangan) membutuhkan waktu yang cukup lama dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah melakukan optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi secara rutin.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah diproduksi calon induk unggul sebanyak 671 ekor yang terdiri dari calon induk unggul ikan hias sebanyak 271 ekor dan tiram mutiara sebanyak 400 ekor. Berikut adalah tabel capaian produksi calon induk unggul dan dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul ikan hias dan tiram mutiara :

Tabel 12. capaian produksi calon induk unggul

Produksi Calon Induk	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
Abalone													-
Ikan Hias			65		156	50							271
Tiram Mutiara					400								400
Kakap putih													-
Bawal Bintang													-
								Jumlah					671



Gambar 11. Dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul

Capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan II Tahun 2023 naik sebesar 262.7% dibandingkan capaian produksi calon induk unggul Triwulan II Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian calon induk unggul ikan laut adalah sebagai berikut :

Tabel 13. calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Produksi calon induk unggul ikan laut									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
450	671	149.11%	185	262.7	1400	47.93%	2400	27.96	

Calon Induk Unggul ikan laut yang diproduksi BPBL Lombok prosentase capaiannya lebih rendah dibandingkan dengan BPBL Ambon dan BPBL Batam namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 14. perbandingan prosentase capaian calon induk unggul ikan laut yang diproduksi

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	1400	671	47.93
BPBL Ambon	2234	1301	58.24
BPBL Batam	1400	1332	95.14
BBPBL Lampung	2910	364	12.51

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 387.726.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp 365.303.400 atau 94,22% dari pagu untuk kegiatan operasional produksi calon induk finfish dan pemeliharaan calon induk kekerangan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 meskipun sudah ada realisasi pada tiram mutiara namun pemeliharaan finfish masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemeliharaan dari benih ke induk sehingga tindak lanjut ke depannya adalah tetap optimalisasi pemeliharaan calon induk unggul yang diproduksi.

6. Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Indikator kinerja ini mengukur persentase keberhasilan UPT Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam menghasilkan paket percontohan teknologi pembenihan pada komoditas unggulan lobster yang diselesaikan sampai 100%, dimana tingkat keberhasilan untuk teknologi pembenihan lobster jika mampu memijahkan dan memelihara larva lobster minimal hingga mencapai fase *phyllosoma*.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada IKU Persentase keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu pemeliharaan *phyllosoma* yang masih terkendala di kematian massal setelah hari ke-7 sejak menetas. Rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan optimalisasi pemeliharaan indukan dan juga pengembangan pemeliharaan *phyllosoma* secara terus menerus.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah optimalisasi pemeliharaan indukan dan juga pengembangan

pemeliharaan *phyllosoma*. Lebih lanjut lagi, pada Triwulan II Tahun 2023, juga telah dilakukan penambahan indukan lobster jenis Mutiara dengan berat berkisar antara 1,2-2 Kg per ekornya. Penambahan indukan lobster, khususnya jenis lobster Mutiara diperlukan untuk percepatan produksi larva.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok :

Tabel 15. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)		Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%		100	0.00

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 209.050.950 atau 69,68% dari pagu yang digunakan untuk belanja barang, belanja barang operasional, belanja barang pemeliharaan dan belanja barang persediaan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 permasalahan yang dihadapi masih sama dengan Triwulan I yaitu: masih belum optimalnya pemeliharaan larva *phyllosoma* baik untuk jenis lobster Mutiara maupun jenis lobster pasir. Sejauh ini BPBL Lombok hanya mampu memelihara larva *phyllosoma* sampai dengan hari ke-7. Tindak lanjut pada Triwulan III, melanjutkan pemeliharaan calon induk dan indukan lobster (Mutiara dan Pasir) dengan perbaikan manajemen pakan dari jenis kekerangan, krustacea dan ikan-ikanan yg sifatnya insidentil. Untuk pemeliharaan larva *phyllosoma* akan terus dilakukan dengan perbaikan teknologi dan peningkatan SDM operator hatchery terkait peningkatan skills dan knowledge dalam manajemen kualitas air dan penyiapan pakan larva.

7. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Indikator kinerja ini merupakan jumlah planlet/propagul yang diproduksi di Laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimana planlet/ propagul sendiri merupakan bibit rumput laut muda (hasil pembesaran dari mikropropagul). Satu individu planlet adalah rumput laut muda dengan ukuran 2-3 buah *thallus* yang berukuran 2-3 cm dengan berat sekitar 0,2 – 0,3 gr per individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu produksi kalus secara mandiri masih belum berhasil dan masih sering terjadinya kematian pada mikropropagul dikarenakan proses transportasi (waktu dan suhu) dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan perbanyakkan induk alam yang digunakan untuk produksi kalus dan berkoordinasi dengan biotrop untuk menekan kematian pada proses transportasi mikropropagul.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah dilakukan perbanyakkan induk alam yang digunakan untuk produksi kalus dan juga berkoordinasi dengan biotrop untuk menekan kematian pada proses transportasi mikropropagul.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, produksi bibit rumput laut kultur jaringan telah terealisasi sebanyak 1.320 planlet, berikut adalah tabel capaian produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan dokumentasi kegiatan Pemeliharaan/penumbuhan mikropopagul menjadi thalus muda/planlet :

Tabel 16. Capaian produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombok

No.	Bulan	Capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	607
6	Juni	713
TOTAL		1320



Gambar 12. Pemeliharaan mikropropagul menjadi thalus muda

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT BPBL Lombok adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT Lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di UPT lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)		Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
1200	1320	110.00%	0	0	3000	44.00%		3000	44.00

Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate di BPBL Lombok lebih rendah daripada BBPBL Lampung dan BPBL Ambon, sedangkan BPBL Batam tidak mempunyai target Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 18. perbandingan prosentase capaian Produksi bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	3000	1320	44.00
BPBL Ambon	3000	3995	133.17
BPBL Batam	0	0	0.00
BBPBL Lampung	3000	2735	91.17

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 398.277.683 atau 79,66% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja modal peralatan dan rehab Lab kultur jaringan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu proses sterilisasi media air untuk produksi planlet pada lab kultur jaringan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan alat sterilisasi berupa *Autoclave* hasil pengadaan bulan Juni 2023 belum bisa dioperasikan karna kondisi jaringan listrik tidak stabil. Sehingga tindak lanjut ke depannya adalah diadakan pembelian Stabilizer untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil (normal), dimana arus yang stabil sangat dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik.

8. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Bioflok yang disalurkan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 328 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran sebagai berikut :

- a. benih ikan ;
- b. pakan ikan *starter*;
- c. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- d. obat ikan dan vitamin;
- e. prasarana dan sarana operasional;
- f. peralatan perikanan;
- g. pendampingan teknis bioflok.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu keterlambatan informasi terkait penentuan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) terutama untuk kelompok aspirasi dan juga

revisi juknis bioflok yang hingga Triwulan I ini masih dalam proses pembahasan di eselon I dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan Tenaga Ahli untuk mempercepat penentuan kelompok dan juga melakukan koordinasi dengan eselon I untuk memonitoring perkembangan juknis bioflok.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah dengan dilaksanakannya koordinasi dengan tenaga ahli dan juga koordinasi dengan eselon I sehingga pada Triwulan II Tahun 2023 ini BPBL Lombok telah selesai melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi sebanyak 30 (tiga puluh) kelompok di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Berikut adalah dokumentasi kegiatan identifikasi dan verifikasi :



Gambar 13. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi bioflok

IKU ini sama dengan UPT lainnya yaitu belum ada realisasi capaian, namun dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2022 capaiannya turun sebesar 100%. Adapun tampilan bantuan bioflok secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke masyarakat									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	70.59	-100	100	0.00%	100	0.00	

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.075.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp. 155.849.664 atau 2,57 % dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan ATK kegiatan dan juga survey serta identifikasi di wilayah Bali, NTB juga NTT.

Pada Tahun Triwulan II Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu adanya perubahan juknis penyaluran bantuan pemerintah bioflok dari Peraturan Dirjen No. 182 Tahun 2023 menjadi Peraturan Dirjen No 262 Tahun 2023 yang baru ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menginstruksikan tim PBJ untuk mempercepat proses pengadaan bioflok supaya proses pengadaan bisa terlaksanakan dan paket bioflok bisa disalurkan pada Triwulan III .

9. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahannya adalah baru bisa dilaksanakannya kegiatan diseminasi teknologi sebanyak 1 (satu) kali dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara lebih intensif kepada tenaga ahli (TA) dan juga 2 anggota dewan DAPIL Propinsi NTB untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan ke masyarakat selanjutnya.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya koordinasi dengan

Tenaga Ahli dan anggota dewan DAPIL Provinsi NTB dimana hasil koordinasi tersebut adalah bahwa kegiatan diseminasi akan dilaksanakan pada Triwulan III di Kota Bima.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan								
Nama Indikator : Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00

Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di BPBL Lombok lebih rendah daripada BBPBL Lampung, BPBL Ambon, dan BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 21. perbandingan prosentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100 %	0 %	0.00
BPBL Ambon	100 %	100 %	100.00
BPBL Batam	100 %	12.5 %	12.50
BBPBL Lampung	100 %	33.33 %	33.33

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.0000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar Rp. 98.888.692 atau 32,96% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan diseminasi teknologi.

Pada Tahun Triwulan II Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah belum bisa dilaksanakannya diseminasi teknologi sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melaksanakan diseminasi teknologi di wilayah yang telah ditentukan.

10. Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Pembangunan perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, program prioritas yang menjadi target Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yaitu mengembangkan model usaha budidaya komoditas unggulan (komoditas lobster) untuk segmentasi pembesaran di Karamba Jaring Apung.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum berjalannya kegiatan budidaya lobster dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah melakukan percepatan pembuatan rumah jaga (ponton) di KJA dan rehab rumah genset beserta gudang pakan segar (ruang freezer) agar kegiatan budidaya lobster dapat segera berjalan.

Perbaikan yang sudah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah pembuatan rumah jaga (ponton) di KJA dan rehab rumah genset beserta gudang pakan segar (ruang freezer) telah selesai dilaksanakan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 kegiatan pembesaran lobster jenis lobster pasir dan lobster mutiara masih terus dilaksanakan pada KJA di perairan Sekotong. Dengan telah terselesaikannya pembuatan rumah jaga KJA dan juga gudang pakan pada instalasi lobster di telong elong, maka kegiatan model usaha pembesaran lobster di kampung lobster – Lombok Timur sudah siap untuk dilaksanakan.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Keberhasilan teknologi komoditas unggulan yang dikembangkan lingkup BPBL Lombok

Nama SK : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan									
Nama Indikator : Persentase Model Usaha Budidaya Komoditas Unggulan yang Dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Triwulan I Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 thd Triwulan I Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I Tahun 2022			Target (%)	Tahunan	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100%	0.00%	100	0.00	

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 145.892.850 atau 96,79 % dari pagu yang digunakan untuk pengadaan ponton dan rumah jaga.

Adapun kendala/ permasalahan yang dihadapi pada Triwulan II Tahun 2023 yaitu pada pengadaan bibit lobster Mutiara ukuran >100 gr sebagai komoditas yang akan digunakan dalam pengembangan model usaha budidaya komoditas unggulan pada instalasi lobster di telong elong. Untuk tindak lanjut ke depannya menginstruksikan kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk dapat berkoordinasi dengan koordinator lobster dalam mencari solusi terkait terkendalanya pengadaan benih khususnya jenis lobster Mutiara dengan ukuran >100 gr.

11. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias TA 2023, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan Sarana dan Prasarana ikan hias kepada kelompok pembudidaya ikan, dimana bantuan yang diberikan berupa paket ikan koi 3, yang terdiri dari :

- a. Wadah pemeliharaan;
- b. Peralatan;
- c. Instalasi air dalam kondisi terpasang;
- d. Instalasi listrik dalam kondisi terpasang;
- e. Perlengkapan kerja;
- f. Induk dan pakan.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan sarana dan prasarana budidaya ikan hias yang disalurkan ke masyarakat, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum bisa dilaksanakannya kegiatan identifikasi dan verifikasi karena masih dalam proses pengecekan proposal yang masuk ke BPBL Lombok dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan berkoordinasi dengan penyuluh dan dinas KP lombok timur untuk segera dilaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya pengecekan proposal yang masuk ke BPBL Lombok dimana secara administrasi terdapat 5 (lima) kelompok yang telah memenuhi persyaratan penerima bantuan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 5 Tahun 2023 yaitu :

1. Kelompok Besopok
2. Kelompok Patuh Karya
3. Kelompok Tunas Galih Jaya
4. Kelompok Sumber Rezky
5. Kelompok Mandiri

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah dilakukan proses identifikasi dan verifikasi pada kelima kelompok tersebut, berikut adalah dokumentasi kegiatan identifikasi dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias :



Gambar 14. Kegiatan Identifikasi dan verifikasi bantuan sarana dan prasarana ikan hias

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat :

Tabel 23. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat

Nama SK :Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias yang disalurkan ke masyarakat									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbanding an Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024		
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00	

IKU ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.000.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3.651.180 dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan ATK kegiatan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu belum bisa dilaksanakannya ketika serah terima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias, sehingga

tindak lanjut ke depannya adalah dilakukan serah terima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias pada Triwulan III.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan

12. Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

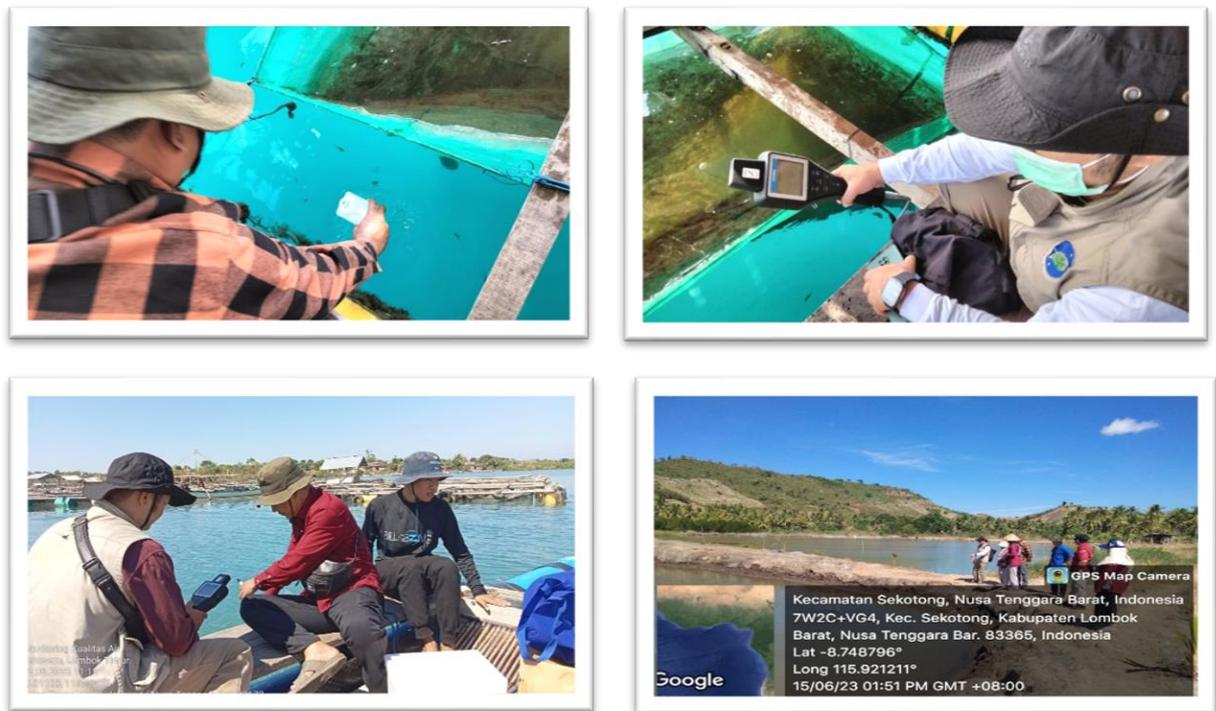
Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium keskanling adalah pelayanan sampel oleh laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Lombok yang terdiri dari pengujian kualitas air, patologi, mikrobiologi (non AMR), dan biologi molekuler.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya kegiatan perjalanan pengambilan sampel oleh tim lab kesling sehingga pada Triwulan II Tahun 2023 ini dilakukan perjalanan untuk pengambilan sampel di beberapa wilayah di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, BPBL telah menguji sebanyak 1242 sampel atau 89.29 % dari target sampel sebanyak 1.391 sampel. Berikut ini adalah rincian jumlah sampel dan dokumentasi kegiatan pengambilan sampel :

Tabel 24. Realisasi Jumlah sampel yang diuji dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

No.	Bulan	Ruang Lingkup Uji					Jumlah	Kumulatif	PROSENTASE CAPAIAN SAMPEL KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
		Kualitas Air	Molekuler	Mikrobiologi	Parasit dan Patologi	Residu			
1	Januari	73	17	16	15	0	121	121	8.70
2	Februari	71	15	6	8	0	100	221	15.89
3	Maret	104	8	33	3	0	148	369	26.53
4	April	351	6	19	7	0	383	752	54.06
5	Mei	119	58	13	9	0	199	951	68.37
6	Juni	239	19	24	9	0	291	1242	89.29



Gambar 15. Kegiatan pengambilan sampel Lab kesling

Prosentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan pada Triwulan II Tahun 2023 turun sebesar 16.04 % dari capaian sampel Triwulan II Tahun 2022, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 25. persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase sampel Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 thd Tahun 2022 (%)	Target 2023	Realisasi	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
50	89.29	178.58%	106.35	-16.04	100	89.29%	2,600	3.43

Jumlah prosentase capaian sampel yang diuji di BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BPBL Batam dan BPBL Ambon namun lebih tinggi dari BBPBL Lampung. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 26. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel lab kesling UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100 %	89.29 %	89.29
BPBL Ambon	100 %	107.49 %	107.49

BPBL Batam	100 %	91.87 %	91.87
BBPBL Lampung	100 %	74.03 %	74.03

IKU ini didukung pagu anggaran sebesar Rp 402.660.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 ini telah terealisasi sebesar 90.535.800 atau 22,48% dari pagu yang digunakan untuk belanja bahan dan belanja barang persediaan .

Pada Triwulan II Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu yaitu masih belum intensnya kegiatan pengambilan sampel lab kesling sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menginstruksikan kepada tim Laboratorium untuk lebih intens dalam melaksanakan kegiatan pengambilan sampel.

13. **Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan.

Sesuai dengan INPRES No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, dimana KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.

Pengujian resistansi antimikroba oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok untuk mengetahui tingkat resistansi mikroba akibat penggunaan antimikroba, dimana semakin kecil tingkat resistansi mikrobanya, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya kegiatan perjalanan pengambilan sampel oleh tim lab kesling sehingga pada Triwulan II Tahun 2023 ini dilakukan perjalanan untuk pengambilan sampel di wilayah Lombok Barat, Lombok tengah, dan Lombok Timur.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, BPBL Lombok telah menguji sampel AMR sebanyak 30 sampel atau 58.82% dari 51 target sampel AMR. Berikut adalah rincian jumlah sampel AMR dan dokumentasi uji sampel AMR :

Tabel 27. Realisasi Jumlah sampel AMR

No.	Bulan	Ruang Lingkup Uji AMR	Jumlah	Kumulatif	PROSENTASE CAPAIAN SAMPEL AMR
1	Januari	4	4	4	7.84
2	Februari	3	3	7	13.73
3	Maret	6	6	13	25.49
4	April	3	3	16	31.37
5	Mei	9	9	25	49.02
6	Juni	5	5	30	58.82



Gambar 16. Kegiatan pengambilan sampel AMR

IKU Persentase sampel antimicrobial resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok turun sebesar 38.73 % jika

dibandingkan dengan IKU capaian sampel tersebut pada Tahun 2022. adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan										
Nama Indikator : Persentase sampel antimikrobal resistance (AMR) yang diuji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok										
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi		Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap		RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	II			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra	
50	58.82	117.64%	96	II	-38.73	100	58.82%	100	58.82	

Jumlah prosentase capaian sampel AMR BPBL Lombok capaiannya lebih rendah dibandingkan BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Ambon. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 29. Perbandingan prosentase capaian jumlah sampel AMR UPT Laut

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	100 %	58.82 %	58.82
BPBL Ambon	100 %	117.64 %	117.64
BPBL Batam	100 %	86 %	86.00
BBPBL Lampung	100 %	69.77 %	69.77

IKU ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 44.393.000 dimana pada Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.200.000 atau 2.70% dari pagu yang digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas pengambilan sampel.

Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu masih belum intensnya kegiatan pengambilan sampel AMR sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menginstruksikan kepada tim Laboratorium untuk lebih intens dalam melaksanakan kegiatan pengambilan sampel.

14. Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur

menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih ditemukan banyak pegawai yang telah mengikuti Bimtek maupun pelatihan lainnya namun belum mengupdate data Kursus di e-pegawai sehingga IP ASN BPBL Lombok masih dalam kategori RENDAH sehingga pada Triwulan II Tahun 2023 ini dilakukan monitoring pegawai yang telah mengikuti diklat/bimtek/webinar untuk dapat mengupdate data kursus pada e-pegawai masing-masing ASN.

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 ini juga diadakan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar sehingga diharapkan seluruh pegawai dapat memahami cara penyusunan naskah dinas dan prosedur pengajuan usulan TTDE. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kegiatan bimbingan teknis tersebut :



Gambar 17. Kegiatan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, berdasarkan surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Nomor B.5050/DJPB.1/KP.700/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal capaian IKU IP ASN Semester I Tahun 2023 lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, BPBL Lombok memperoleh nilai 76,45. Berikut adalah capaian IP ASN BPBL Lombok dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SEMESTER I TAHUN 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	12,67	30,98	25,00	5,00	73,64	Sedang
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	15,41	22,56	25,00	5,00	67,97	Rendah
3.	Dit Perbenihan	14,13	32,24	25,00	4,90	76,27	Sedang
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan	13,10	33,21	25,00	4,79	76,10	Sedang
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	16,18	14,61	25,00	4,76	60,55	Sangat Rendah
6.	BBPBAP Jepara	11,84	33,60	25,00	4,93	75,37	Sedang
7.	BBPBAT Sukabumi	12,28	37,25	24,41	4,93	78,87	Sedang
8.	BBPBL Lampung	11,64	39,61	25,00	4,89	81,14	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	12,69	31,40	24,43	4,93	73,45	Sedang
10.	BPBAP Takalar	10,84	40,00	25,00	4,90	80,75	Sedang
11.	BPBAP Ujung Batee	13,02	38,02	25,00	4,95	81,00	Tinggi
12.	BPBAT Mandiangin	13,18	39,46	25,00	4,91	82,55	Tinggi
13.	BPBAT Sungai Gelam	12,87	39,76	25,24	5,00	82,87	Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	12,55	39,43	25,00	5,00	81,98	Tinggi
15.	BPBL Ambon	12,32	32,19	25,70	5,00	75,21	Sedang
16.	BPBL Batam	12,66	28,82	26,70	4,70	72,88	Sedang
17.	BPBL Lombok	11,36	35,19	25,00	4,91	76,45	Sedang
18.	BLUPPB Karawang	9,77	39,75	25,00	4,84	79,36	Sedang
19.	BPIUUK Karangasem	13,04	36,25	24,14	4,93	78,36	Sedang
20.	BPKIL Serang	13,61	31,88	25,00	4,89	75,38	Sedang
Rata-Rata		12,76	33,81	25,03	4,91	76,51	Sedang

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 naik sebesar 14.02 % dibandingkan capaian pada IKU Triwulan II Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IP ASN BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Indeks profesionalitas ASN lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Indeks profesionalitas ASN lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
73	76.45	104.73%	67	14.02	81	94.38%	81	94.38

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan Permasalahan yang terjadi pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah BPBL Lombok masih dalam kategori SEDANG dalam nilai IP ASN, sehingga tidak lanjut ke depannya adalah menginstruksikan kasubbag umum untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai supaya pegawai selain memasukkan sertifikat di aplikasi *e-SKP BKN*, juga memasukkan di aplikasi *epegawai KKP* yang menjadi dasar penghitungan nilai IP ASN.

15. IKU Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian

besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah proses pengumpulan dokumen dan data dukung yang membutuhkan waktu cukup lama dan rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan dilakukan interaksi lebih intens melalui rapat-rapat internal yang diagendakan dilakukan secara bulanan sebagai wadah komunikasi untuk mewujudkan Zona Integritas.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah dengan mengadakan rapat internal dalam rangka pengumpulan dokumen per semester I Tahun 2023 pada area manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik. Berikut adalah rapat internal yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan dokumen WBK :



Gambar 18. Kegiatan rapat internal dalam rangka pengumpulan dokumen per semester I Tahun 2023

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	81	0.00%	81	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator ini dan permasalahan yang terjadi pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah masih banyak ketua dan anggota ZI yang belum memasukkan dokumen WBK ke google drive khusus untuk WBK Tahun 2023 sehingga tindak lanjut ke depannya adalah memonitoring dokumen WBK yang telah *terupload* di google drive khusus WBK.

16. IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

Pada Triwulan sebelumnya belum ada permasalahan yang terjadi karena belum ada LHP BPK yang harus diselesaikan dan rekomendasi untuk Triwulan II Tahun 2023 ini adalah melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut dari rekomendasi Triwulan sebelumnya itu adalah dengan mulai menyusun hardcopy dokumen keuangan secara rapi dalam lemari khusus dokumen keuangan dan juga menyimpan softcopy dokumen keuangan di *google drive* sebagai bentuk percepatan kinerja apabila ada permintaan data dari BPK atau eselon I DJPB.

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 BPBL Lombok mendapat surat dari Auditor Utama Keuangan Negara IV No. 73/S/XVII/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal pemberitahuan pengumpulan data dan informasi dimana BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas program pendukung kebijakan ekonomi biru serta perencanaan pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan PNPB lainnya serta belanja barang dan Jasa Tahun 2022-2023 (Semester I) yang harus ditindaklanjuti karena akan dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal 5 s/d 26 Juli 2023.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian prosentase penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Prosentase Penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker BPBL Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	100	0.00%	100	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah adanya surat dari Auditor Utama Keuangan Negara IV No. 73/S/XVII/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal pemberitahuan pengumpulan data dan informasi dimana BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja atas program pendukung kebijakan ekonomi biru serta perencanaan pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan PNBP lainnya serta belanja barang dan Jasa Tahun 2022-2023 (Semester I) pada tanggal 5 s/d 26 Juli 2023 sehingga tindak lanjut ke depannya adalah dilakukan pengumpulan dokumen permintaan dari BPK tersebut.

Menginstruksikan kepada PPK, tim PBJ dan bendahara penerimaan untuk memenuhi permintaan dokumen dari BPK tersebut

17. IKU Nilai Rekon SAKIP Lingkup Satker BPBL Lombok

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian atas Kinerja Lingkup BPBL Lombok yang dilakukan melalui Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya / DJPB dengan Biro perencanaan dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada. Dengan adanya rekon kinerja diharapkan terjadi sinergi yang baik antara satker UPT dan DJPB dalam mempercepat capaian kinerja yang sudah ditetapkan.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan mekanisme kerja sesuai dengan Permen KP 43 Tahun 2023, dimana BPBL Lombok memerlukan waktu dalam pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi untuk menentukan tim kerja berdasarkan komposisi validitas atau nilai tingkat kendali indikator kinerja sehingga rekomendasi penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan ketentuan yang terbaru.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan ketentuan yang terbaru, seperti misalnya menyusun validasi IKU, Matriks Peran Hasil (MPH), dan dokumen perencanaan tiap pegawai pada aspek perencanaan.

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku ada penambahan menu terbaru yaitu Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Kinerja yang akan diperiksa oleh tim itjen KKP dimana BPBL Lombok telah melakukan pengisian LKE kinerja tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Berikut adalah *screenshot* hasil sementara LKE Kinerja BPBL Lombok.

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	0413060000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK LKE Satker	24.00	24.00	11.25	19.25	78.5	BB

Gambar 19. Screenshot LKE Kinerja BPBL Lombok

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai rekon SAKIP lingkup BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Nilai Rekon SAKIP lingkup Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator : Nilai Rekon SAKIP Lingkup Satker BPBL Lombok									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi		Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	II			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	II	0	100	0.00%	90	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada IKU ini dan permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah adanya penghitungan ketepatan waktu dalam menyampaikan LKj di website BPBL Lombok sehingga Tindak lanjut ke depannya adalah menyampaikan LKj ke website BPBL Lombok secara tepat waktu.

18. IKU Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (%)

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

Pada triwulan sebelumnya potensi permasalahan yang dapat terjadi adalah kurang lengkapnya pendokumentasian pencairan anggaran sehingga rekomendasi untuk permasalahan tersebut adalah melakukan perbaikan secara terus menerus terkait pendokumentasian pencairan anggaran untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pencairan suatu pekerjaan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini menyusun hardcopy dokumen keuangan secara rapi dalam lemari khusus dokumen keuangan dan juga menyimpan softcopy dokumen keuangan di *google drive* sebagai bentuk percepatan kinerja apabila ada permintaan data dari Itjen atau eselon I DJPB.

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan surat dari sesditjen perikanan budidaya nomor B.4812/DJPB.1/RC.610/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Capaian IKU prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Lingkup DJPB

Triwulan II Tahun 2023, nilai BPBL Lombok adalah sebesar 93.33% atau ada 1 rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti oleh BPBL Lombok. Berikut adalah Capaian IKU prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Lingkup DJPB Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup DJPB lainnya :

Tabel 34. Perbandingan prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPB" Triwulan II Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi
1	Setditjen Perikanan Budidaya	55	50	90.91	5
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	9	8	88.89	1
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	15	14	93.33	1
4	Direktorat Perbenihan	0	0	100.00	0
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	0	0	100.00	0
6	BBPBL Lampung	0	0	100.00	0
7	BBPBAT Sukabumi	0	0	100.00	0
8	BBPBAP Jepara	0	0	100.00	0
9	BPBL Ambon	21	21	100.00	0
10	BPBAP Ujung Batee	0	0	100.00	0
11	BPBAP Takalar	30	30	100.00	0
12	BPBAT Sungai Gelam	0	0	100.00	0
13	BPBAT Tatelu	24	20	83.33	4
14	BPBAP Situbondo	0	0	100.00	0
15	BPBAT Mandiangin	0	0	100.00	0
16	BPBL Lombok	15	14	93.33	1
17	BPBL Batam	15	14	93.33	1
18	BLUPPB Karawang	0	0	100.00	0
19	BPIU2K Karangasem	0	0	100.00	0
20	BPKIL Serang	0	0	100.00	0
TOTAL		184	171	92.93	13

Capaian IKU ini turun sebesar 6.67% dibandingkan Triwulan II Tahun 2022 yaitu, Adapun tampilan secara singkat atas capaian Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
75	93.33	124.44%	100	-6.67	100	93.33%	90	103.70

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan II Tahun 2023 permasalahan yang dapat terjadi adalah belum terselesaikannya 1 (satu) tindak lanjut atas

rekomendasi itjen sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyelesaikan rekomendasi tersebut sehingga tidak ada sisa rekomendasi di BPBL Lombok.

19. IKU Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar;

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Bitrix24*, dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Dokumen (Bobot 20%) : Renstra 2020-2024; Perjanjian Kinerja; Manual IKU; Rencana Kerja; Rencana Aksi Kinerja atas Perjanjian kerja; Laporan Kinerja.
2. Keaktifan (bobot 80%): Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pada Triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yaitu masih sering terjadi keterlambatan penguploadan kegiatan pada aplikasi bitrix sehingga tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah perlu ada adanya *self awarness* dalam penginputan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat ter-upload tepat waktu.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah melakukan penginputan secara tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat dipublikasikan secara tepat waktu.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor B.4898/DJPB.1/RC.610/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPB Triwulan II Tahun 2023, BPBL Lombok meraih nilai 100 dari target 92.

Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 100%, Adapun tampilan secara singkat atas capaian Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
92	100	108.70%	100	0	92	108.70%	84	119.05

Prosentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sama dengan UPT Laut lainnya, yaitu 100%, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 37. Capaian Manajemen Pengetahuan Lingkup UPT DJPB

No	Unit Kerja	Nilai
1	BBPBL Lampung	100
2	BBPBAT Sukabumi	100
3	BBPBAP Jepara	100
4	BPBL Ambon	100
5	BPBAP Ujung Batee	100
6	BPBAP Takalar	100
7	BPBAT Sungai gelam	100
8	BPBAT Tatelu	100
9	BPBAP Situbondo	100
10	BPBAT Mandiangin	100
11	BPBL Lombok	100
12	BPBL Batam	100
13	BLUPPB Karawang	100
14	BPIUUK Karangasem	100
15	BPKIL Serang	100

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan pada Triwulan II Tahun 2023 ini terdapat permasalahan yaitu dokumen yang diupload di bitrix belum memenuhi ketentuan 4W dan 1H, sehingga tindak lanjut pada Triwulan berikutnya adalah mendorong pejabat untuk mengupload dokumen sesuai dengan ketentuan pada aplikasi bitrix.

20. IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBL Lombok (%);

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam

rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah masih terjadi kesalahan kode akun dalam penginputan di aplikasi SAKTI dan ditemukan adanya ketidakcermatan dalam membuat dokumen Rencana Penarikan Dana, sehingga tindak lanjut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah melakukan koordinasi internal antara pengelola keuangan untuk mengurangi terjadinya ketidaksesuaian akun dalam penginputan pada aplikasi SAKTI dan koordinasi antara penyusun anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Rencana Penarikan Dana tidak jauh meleset dari apa yang telah dibuat.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilakukan koordinasi internal antara pengelola keuangan ketika melakukan penginputan di aplikasi SAKTI untuk meminimalisir kesalahan kode akun dan koordinasi antara penyusun anggaran dan PPK supaya Rencana Penarikan Dana tidak jauh meleset dari apa yang telah dibuat sehingga meningkatkan nilai capaian IKPA.

Selain itu pada triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan penghitungan nilai IKPA dimana BPBL Lombok memperoleh nilai IKPA sebesar 89,83 atau 109,55% dari target Triwulan II Tahun 2023. Nilai IKPA ini naik sebesar 1,51% dibandingkan nilai IKPA Triwulan II Tahun 2022. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai IKPA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 38. Nilai IKPA Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : nilai IKPA satker BPBL Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
82	89.83	109.55%	88.49	1.51	89	100.93%	89	100.93

Nilai IKPA BPBL Lombok prosentase capainnya lebih tinggi dibandingkan dengan BBPBL Lampung dan BPBL Ambon namun lebih rendah dari BPBL Batam. Berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 39. perbandingan prosentase capaian nilai IKPA

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	82	89.83	109.55
BPBL Ambon	82	88.44	107.85
BPBL Batam	82	94.23	114.91
BBPBL Lampung	82	83.02	101.24

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan II Tahun 2023 ini permasalahan yang terjadi adalah adanya akun hutang yang belum diterima tagihannya sampai dengan periode bulan ke 6 karena BAST dari penyedia ke PPK dilaksanakan pada akhir Juni yang menyebabkan SPPD baru bisa diterbitkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Juli sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan koordinasi antara tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan Operator Komitmen supaya BAST dilaksanakan pada awal bulan atau tengah bulan sehingga pembayaran bisa dilakukan pada bulan yang sama dan tidak menjadi hutang.

21. IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok (%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

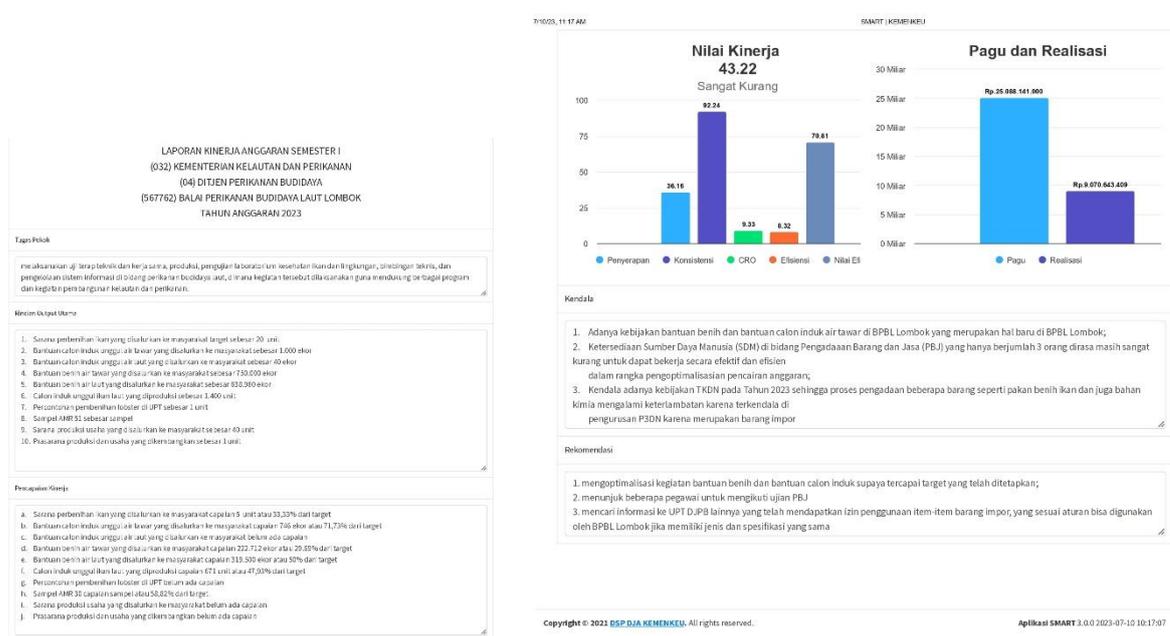
Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pada triwulan sebelumnya terdapat permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan pola pengisian pada aplikasi SMART DJA yang mengacu pada aplikasi SAKTI sehingga tindak lanjut Triwulan II Tahun 2023 adalah menyesuaikan penginputan SMART DJA dengan pola yang terbaru.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah melakukan pengisian laporan kinerja anggaran semester I Tahun 2023 karena pengisian capaian output sudah otomatis terisi jika sudah dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI. Berikut adalah laporan kinerja anggaran semester I Tahun 2023 yang telah diisi oleh BPBL Lombok :



Gambar 20. Laporan Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2023 pada aplikasi SMART DJA

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian NKA satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker BPBL Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	82	0.00%	85	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat permasalahan yaitu kurang tepat waktunya pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan data capaian output pada aplikasi SMART DJA tidak segera terisi sehingga tindak lanjut pada triwulan berikutnya adalah berkoordinasi dengan operator komitmen dalam hal pengisian capaian output aplikasi SAKTI.

22. IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa (%);

IKU tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Lombok diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)
2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)
3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)
4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
- 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
- 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)

- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah proses pengadaan beberapa barang seperti pakan benih ikan dan juga bahan kimia mengalami keterlambatan karena terkendala di pengurusan P3DN karena merupakan barang impor sehingga tindak lanjut Triwulan II Tahun 2023 adalah mencari informasi ke UPT DJPB lainnya yang telah mendapatkan izin penggunaan item-item barang impor, yang sesuai aturan bisa digunakan oleh BPBL Lombok jika memiliki jenis dan spesifikasi yang sama.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah berkoordinasi dengan UPT Lainnya yang telah mendapatkan izin penggunaan item-item barang impor sehingga pakan benih ikan bisa segera diselesaikan proses pengadaan barang dan jasanya.

Sedangkan bahan kimia meskipun sudah diselesaikan proses pengadaannya namun masih belum dapat dilakukan pengiriman karena harus melalui sistem PO (*Pre Order*) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022		Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada Indikator kinerja ini dan Pada Triwulan II Tahun 2023 permasalahan yang terjadi adalah adanya perubahan juknis penyaluran bantuan pemerintah bioflok dari Peraturan Dirjen No. 182 Tahun 2023 menjadi Peraturan Dirjen No 262 Tahun 2023 yang baru ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga tindak lanjut ke depannya

adalah menginstruksikan tim PBJ untuk mempercepat proses pengadaan bioflok supaya proses pengadaan bisa terlaksanakan dan paket bioflok bisa disalurkan pada Triwulan III .

23. IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok (%);

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPBL Lombok yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (25%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (15%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (15%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (20%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (25%).

Pada triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah adanya sebagian barang-barang yang dalam kondisi rusak berat dan perlu untuk diusulkan penghapusan yang berlokasi di instalasi Gerupuk, Lombok Tengah, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah memindahkan barang-barang rusak berat yang berada di gerupuk ke sekotong untuk dilakukan penghapusan.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dipindahkannya barang rusak berat tersebut dari gerupuk, berikut adalah dokumentasi alat-alat rusak berat yang telah dipindahkan :



Gambar 21. Alat rusak berat yang dipindahkan dari gerupuk ke Sekotong

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Satker BPBL Lombok								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	77.5	0.00%	72.5	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah Meskipun barang rusak berat tersebut sudah dipindahkan ke Sekotong, namun belum bisa dilakukan proses lelang sehingga tindak lanjut ke depannya adalah melakukan proses lelang untuk barang rusak berat.

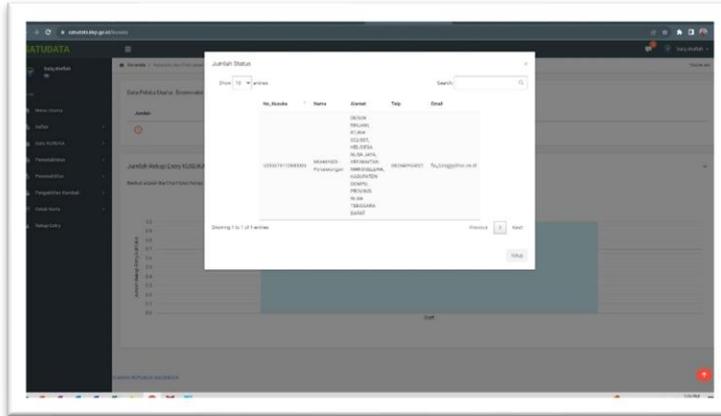
24. IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA (%)

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA, namun pada Tahun 2023 ini BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah belum adanya penginputan data pada Aplikasi KUSUKA dan masih belum bisa digunakan dengan user id yang telah diberikan per UPT, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah berkoordinasi dengan TIM DJPB dan PUSDATIN terkait kendala pada Aplikasi KUSUKA.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah sudah dapat dilakukan pengisian data perorangan pada aplikasi tersebut, berikut adalah dokumentasi salah satu pengisian data yang berhasil dilakukan :



Gambar 22. Pengisian data pada aplikasi KUSUKA

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	80	0.00%	80	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah meskipun sudah bisa dilakukan penginputan data namun aplikasi tersebut masing sering *down*, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah tetap berkomunikasi kepada tim PUSDATIN apabila mengalami kendala dalam penginputan data.

25. IKU Indeks pengelolaan kepegawaian

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok.

Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKU ini merupakan IKU Baru dimana pada Tahun 2022 tidak ada penilaian indeks pengelolaan kepegawaian, namun pada Tahun 2023 ini dilakukan penilaian indeks pengelolaan kepegawaian tersebut.

Permasalahan pada triwulan sebelumnya adalah belum disiplinnya ASN BPBL Lombok dalam mendokumentasikan berkas-berkas terkait kepegawaian dalam bentuk *soft copy (file)*, yang menjadikan faktor penghambat dalam pengusulan berkas kenaikan pangkat ataupun hal lainnya, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyarankan kepada seluruh ASN BPBL Lombok agar memiliki softcopy dari semua berkas kepegawaian dan disimpan pada google drive, my SAPK-BKN ataupun e-pegawai KKP

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilakukan pendampingan kepada pegawai yang belum bisa mengisi data di my SAPK-BKN ataupun e-pegawai KKP .

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan UPT lainnya karena capaian pada akhir tahun dan tidak dapat dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya karena tahun 2022 tidak ada IKU indeks pengelolaan kepegawaian. Adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU indeks pengelolaan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Indeks Pengelolaan kepegawaian

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok									
Nama Indikator :indeks pengelolaan kepegawaian									
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi		Perbandingan Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	II			Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	II	0	3	0.00%	3	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan Permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah masih adanya ASN yang tidak konfirmasi apabila mengadakan perjalanan dinas secara mendadak yang menyebabkan rekap kehadiran pegawai saat awal bulan berikutnya tidak sesuai sehingga tindak lanjut ke depannya adalah menyarankan kepada seluruh ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas secara mendadak untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran di kantor via telpon supaya pengelola kepegawaian bisa melakukan pengecekan kembali sebelum rekap absensi di awal bulan berikutnya.

26. IKU Nilai Pengawasan kearsipan ;

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pada Triwulan sebelumnya permasalahan yang terjadi adalah terjadinya kesalahan prosedur dalam pengoperasionalan e-Layar yang berimplikasi pada tidak terkirimnya surat yang telah di TTDE ke tujuan sehingga tindak lanjut ke depannya adalah mmelakukan konsultasi dengan pihak kesekretariatan DJPB dan juga PUSDATIN dalam pengoperasian e-layar/ monitoring surat masuk dan keluar.

Perbaikan yang sudah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 ini adalah telah dilaksanakannya konsultasi kepada pihak sekretariat DJPB dan juga PUSDATIN sehingga pengoperasian e-layar bisa berjalan optimal.

Selain itu pada Triwulan II Tahun 2023 ini juga diadakan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar sehingga diharapkan seluruh pegawai dapat memahami cara penyusunan naskah dinas dan prosedur pengajuan usulan TTDE. Berikut adalah dokumentasi kegiatan kegiatan bimbingan teknis tersebut :



Gambar 23. Kegiatan bimbingan Teknis perihal Tata naskah dinas dan pengusulan TTDE melalui aplikasi E-Layar

IKU ini belum dapat dibandingkan dengan UPT lainnya dan tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena capaian akan dihitung pada akhir tahun. Adapun tampilan secara singkat atas capaian nilai pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Nilai Pengawasan Kearsipan

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Nilai Pengawasan kearsipan								
Triwulan II Tahun 2023			Realisasi	Perbandingan	Target 2023	Realisasi Terhadap	RENSTRA 2020-2024	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan Tahun 2022	Realisasi TW II 2023 dibandingkan TW II 2022	Target 2023	Target Tahunan (%)	Target 2024	Realisasi terhadap target akhir renstra
0	0	0.00%	0	0	75	0.00%	75	0.00

Tidak ada alokasi anggaran khusus pada indikator kinerja ini dan permasalahan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah masih kurang rapihnya draft pengusulan surat melalui TTDE meskipun sudah dilakukan bimtek, sehingga tindak lanjut ke depannya adalah pengelola persuratan membuat draft surat yang telah paten sehingga ASN yang mengusulkan draft surat tidak harus berkali-kali mengusulkan draft karena kesalahan huruf atau spasi.

Permasalahan :

3.3. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

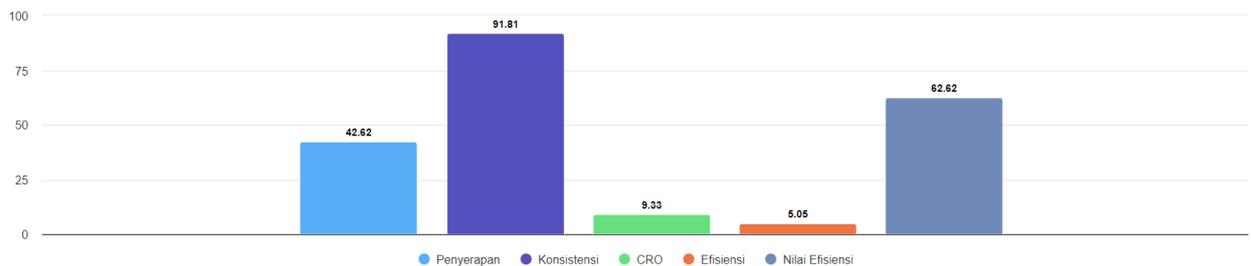
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. **25.088.141.000** (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu ribu rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 8.226.682.499 atau 32.90% dari pagu.

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	567762 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	PAGU	7,405,500,000	16,512,895,000	1,085,646,000	0	0	0	0	0	0	0	25,004,041,000
		REALISASI	3,562,126,209 (48.10%)	4,067,454,660 (24.63%)	597,101,630 (55.00%)	0	0	0	0	0	0	0	8,226,682,499 (32.90%)
		SISA	3,843,373,791	12,445,440,340	488,544,370	0	0	0	0	0	0	0	16,777,358,501
GRAND TOTAL			PAGU	7,405,500,000	16,512,895,000	1,085,646,000	0	0	0	0	0	0	25,004,041,000
			REALISASI	3,562,126,209 (48.10%)	4,067,454,660 (24.63%)	597,101,630 (55.00%)	0	0	0	0	0	0	8,226,682,499 (32.90%)
			SISA	3,843,373,791	12,445,440,340	488,544,370	0	0	0	0	0	0	16,777,358,501

Gambar 24. Screenshot aplikasi OMSPAN

3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut ini adalah hasil efisiensi anggaran di BPBL Lombok berdasarkan aplikasi Smart DJA :



Gambar 25. Hasil efisiensi berdasarkan aplikasi SMART DJA

Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 62,62

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja BPBL Lombok Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pada Triwulan II Tahun 2023, hasil pengukuran dan analisa yang dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada seluruh indikator-indikator utama (IKU) yang menjadi target BPBL Lombok didapatkan hasil dari total 26 IKU, sebanyak 11 indikator kinerja memenuhi target dengan realisasi >100%.

Selanjutnya, dalam mempercepat dan meningkatkan kinerja BPBL Lombok di tahun-tahun kedepan beberapa upaya-upaya konkrit yang dapat dilakukan, antara lain: (i) memasarkan hasil produksi benih kepada para stakeholder yang berpotensi menyerap benih hasil produksi; (ii) mengadakan rapat secara berkala untuk memonitoring target triwulan berikutnya dan (iv) mendorong pengoperasian sarana instalasi budidaya lobster di dusun telong elong, kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya, Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian-capaian output dari IKU yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BPBL Lombok. Lebih lanjut lagi, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/ input dalam merumuskan kebijakan baik di level UPT maupun di tingkatan yang lebih tinggi (level pusat) di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Triwulan II Tahun 2023 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.